

16

**PERANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM MENUNJANG PENERIMAAN  
PENDAPATAN DAERAH TINGKAT I**

(Sebuah studi tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik  
Nama Kendaraan Bermotor yang mempengaruhi terhadap Peningkatan  
Pendapatan Daerah Tingkat I pada Kantor Cabang Dinas  
Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Pamekasan.)

**S K R I P S I**

Dijadikan salah satu persyaratan wajib untuk memenuhi syarat guna  
mendapat gelar Sarjana Administrasi Negara  
( Public Administration )

Disusun oleh :

**P A I D I**

NTRM : 52679 / III / 78 / RI



UNIVERSITAS MADURA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PAMEKASAN  
1988

6

**TANDA PERSetujuan SKRIPSI**

**Judul** : PERANAN PENGUNJUTAN PAJAK KENDARAAN BENDU  
TOR DAN BEA DALIK NAMA KENDARAAN BENDU  
TOR DALAM HUKUMANNY PERUBAHAN PERADAP-  
AN DAERAH TINGKAT I

**Dibaca oleh** : P & I D I

**Nomor NIM** : 51674 / XII / 78 / 83

**Universitas** : MADURA

**Fakultas** : ILMU ADMINISTRASI

**Jurusan** : ADMINISTRASI NEGARA

**Ponakan,**

**1986**

**Disetujui Oleh :**  
Wakil Dekan Fakultas

**Disetujui Oleh :**  
Dosen Pembimbing

**Disetujui**  
Dekan LF 3 H

**Ketua Tim Pengaji**

**Anggota**

1.

2.

## B A B I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat adil makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, berkeadilan, berkeadilan dan bertanggung jawab dalam kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang serasi, bersahabat, tertib dan damai, maka mahlak perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang.

Dalam hal ini Program merupakan sebagai berikut

Pembangunan adalah :

1. Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam Negara Pembinaan Bangsa. (actions building) 1 "

Pemilihan pula menurut pendapat Prof. Bintoro Pembangunan

adalah : " Suatu orientasi dan kegiatan usaha yang terpadu (lihat 2) "

Pembangunan dilaksanakan didalam rangka pembangunan masa depan Indonesia semuanya. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah dan materi, melainkan keadilan, kecerdasan, kecerdasan dan kekeluargaan.

---

1. Nigra, SP, MPA, Dr, Administrasi Pembangunan Gunung Agung, Jakarta, No. 10, hal. 111, halaman 111

2. Bintoro Kjekromojoyo, H. Prof. Dr. dan Hartono Sidigjo, M. Sc., Teori dan Strategi Pembangunan Gunung Agung, Jakarta No. 111, hal. 1.

antara keduanya, sehingga terwujudlah landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas -  
kebahasaan sendiri.

Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan pembiayaan yang memadai yang terdapat di mana berambur pada kesempatan dalam Majelis tertinggi pemerintahan diluar garis dan rakyat yang lebih-lebih ini harus rakyat kami dipertahankan dan semakin meningkat. hal ini sesuai dengan program Presiden Soekarno.

" Oleh karena itu peningkatan pemerintahan Majelis -  
solusi penyediaan dan sumber-sumber di luar mi  
nyak kami dan garis dalam kesempatan keharusan yang  
melihat bagi keberhasilan pelaksanaan Republik IV  
3) "

Sejak dalam rangka meningkatkan pembangunan ke arah  
sah pokok wilayah Indonesia dalam Republik IV sebagai  
kelanjutan Republik III dan Republik sebelumnya pembangu-  
nan daerah tetap dilanjutkan dan ditingkatkan agar tetap-  
terhina kestabilan politik serta keamanan bangsa.

Perintah Lingkar I sebagai Daerah Otonom untuk me-  
ngantar dan mengatur rumah tangganya sendiri dipertahankan -  
bilang yang berawal dari dasar pendekatan Daerah, serta  
golongannya terdapat pada pasal 25 undang-undang R.I. nomor  
5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah  
adapun dasar pendekatan Daerah adalah :

---

3. Pidato Keagamaan Presiden R.I. Soekarno di de-  
pan sidang R.P.R. tanggal 16 Agustus 1963 ke-  
peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1963.

a). Pendapatan asli Daerah terdiri dari

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Pendapatan Daerah
4. Lain-lain usaha Daerah yang sah

b). Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah terdiri dari :

1. Subsidi dari Pemerintah
2. Subsidi-subsidi lain, yang diterima dengan penuh tanggung-jawab.

c). Lain-lain pendapatan yang sah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 Pajak Negara yang telah diizinkan kepada Daerah ada lah :

Daerah Tingkat I :

1. Pajak rumah tinggal
2. Pajak kendaraan bermotor
3. Pajak Pertambahan

Daerah Tingkat II :

1. Pajak jalan
2. Pajak Koperasi
3. Pajak pertanggung

Selain itu berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1969 diizinkan pula :

Daerah Tingkat I :

- Dan baik maka kendaraan bermotor



